

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PELAKSANAAN

KEGIATAN 1.20.1.20.05.17.34

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Program/Kegiatan :
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan Aset Daerah
3. Nama KPA/PPTK :
 - Nama KPA : KIKI PEKIK PRAJA ALAM,SSTP,MSi
 - Nama PPTK : KASMIRAN
4. Rujukan
 - a. KAK Perencanaan
 - b. RPJMD :

Misi RPJMD Nomor 3 Tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional
 - c. Renstra SKPD :

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum Tugas Fungsi
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018
 - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD
 - b. Gambaran Umum Penerima Manfaat

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, oleh karena hal tersebut maka pengendalian yang baik akan mempermudah dalam penyajian data apabila diperlukan dalam rangka pertanggungjawaban SKPD maupun apabila ada pengawasan dari Auditor Internal maupun eksternal, serta Pemeriksa lainnya.
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

6. Keluaran Kegiatan

- Output : - Tersusunnya peraturan tentang Pengelolaan Aset Daerah

7. Strategi Pencapaian Keluaran :

- a. Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

NO	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Belanja cetak dan Penggandaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Belanja Barang Perlengkapan Komputer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Belanja Modal Peralatan dan mesin Penggadaan personil Komputer								x	x	x		

➤ Jadwal Penyerapan anggaran

Triwulan I	Rp 6.840.197,00
Triwulan II	Rp 9.849.197,00
Triwulan III	Rp 8.349.197,00
Triwulan IV	Rp 8.358.200,00

8. Waktu Pelaksanaan

9. Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Umum

➤ Spesifikasi Teknis

10. Biaya yang diperlukan

Rp. 33.396.791,00

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN
1	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00
2	Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga	1.990.291,00
3	Belanja cetak dan Penggandaan	4.309.000,00
4	Belanja Barang Perlengkapan Komputer	2.197.500,00
5	Belanja Modal Peralatan dan mesin Penggadaan personil Komputer	23.700.000,00

11. Penerima Manfaat
 - Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan
12. Monitoring dan Evaluasi
 - Monitoring dan evaluasi Pelaporan dilaksanakan setiap bulan

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Aset Daerah

PPTK,
Kasubid Penghapusan dan
Pemindah tangan

KIKI PEKIK PRAJA ALAM, SSTP, MSi
NIP. 19791212 199810 1 002

KASMIRAN
NIP. 19591231 198501 1 009

Mengetahui
Pengguna Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003